GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar	**: Koran Tempo**	**Tgl/Bln/Thn**	**: 29 Agustus 2007**
Subyek	**: Kayu Ilegal**	**Hari**	**: Rabu**
		Halaman	**: A9**

Penyelundupan 15 Ton Kayu Ilegal Digagalkan

Kepolisian Daerah Riau memeriksa bekas pejabat Dinas Kehutanan Riau.

Pekanbaru -- Satuan Polisi Air Kepolisian Resor Bengkalis, Riau, menggagalkan penyelundupan 15 ton kayu balak tim ilegal tujuan Malaysia. Kayu yang diangkut kapal motor Sinar Mas Jaya ini ditangkap pada Senin tengah malam lalu di perairan Desa Mengkopot, Merbau, Bengkalis. Polisi juga menangkap empat orang tersangka. Kayu balak tim merupakan kayu yang sudah diolah berbentuk balok.Kepala Polres Bengkalis Ajun Komisaris Besar Anang Rifandoko mengatakan kayu yang diangkut itu tidak dilengkapi dokumen sah. "Setelah kami periksa ternyata akan diselundupkan ke Malaysia," kata Anang di Pekanbaru kemarin. Empat tersangka dibawa ke markas polisi untuk diperiksa. Sedangkan 15 ton kayu ditampung di Sungai Bengkel.

Anang tidak bersedia menjelaskan identitas empat tersangka demi penyelidikan dan pengembangan kasus ini. Yang pasti empat orang itu terdiri atas satu nakhoda dan tiga anak buah kapal. Polisi kini sedang memburu pemilik layu ilegal tersebut. "Kalau sudah ditangkap baru kami berikan namanya," kata dia.

Sementara itu, Kepolisian Daerah Riau memeriksa mantan Kepala Dinas Kehutanan Riau Fauzi Saleh dalam kasus pembalakan liar. Pemeriksaan Fauzi terkait dengan penerbitan Rencana Kerja Tahunan 2002 untuk PT Nusa Prima Manunggal di Kabupaten Pelalawan. "Klien saya masih berstatus saksi," kata Fahmi, kuasa hukum Fauzi Saleh.

Fahmi mengatakan izin rencana kerja tahunan tersebut diterbitkan kliennya setelah ada rekomendasi dari Kepala Dinas Kehutanan Pelalawan dan Kepala Badan Pengawas Lingkungan Daerah Pelalawan. Untuk mengawasi apakah PT Nusa Prima Manunggul beroperasi sesuai dengan rencana kerja tahunan bukan tanggung jawab kliennya.

Menurut Fahmi, pengawasan di lapangan menjadi tanggung jawab pemberi rekomendasi, yakni pejabat di Kabupaten Pelalawan. Selain itu, rencana kerja tahunan yang disetujui Fauzi untuk penanaman dan bukan penebangan. "Peruntukan lahan ini yang menentukan kepala daerah dan pejabat di kabupaten," katanya.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Riau Ajun Komisaris Besar Zulkifly mengatakan pemeriksaan Fauzi masih sebatas sebagai saksi. Dia diperiksa terkait dengan jabatannya sebagai kepala dinas kehutanan saat rencana kerja tahunan Nusa Prima terbit. "Dia sudah beberapa kali diperiksa, tapi masih sebagai saksi," ujarnya. **Bobby Triadi**

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup